

## **BAB II**

### **POLITIK LUAR NEGERI ARAB SAUDI**

Dalam bab ini penulis membahas mengenai politik luar negeri Arab Saudi, namun sebelum masuk dalam pembahasan yang pokok, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai hubungan politik internasional dengan kebijakan luar negeri dan hubungan internasional, Serta menjelaskan mengenai politik luar negeri dan sifat- sifat politik luar negeri dengan tujuan untuk mengenal terlebih dahulu hal-hal tersebut sebelum masuk pembahasan inti dalam bab ini, yakni mengenai politik luar negeri dan kebijakan luar negeri Arab Saudi.

Pada politik luar negerinya Arab Saudi kini mengimplementasikan kebijakan luar negeri yang bersifat *Hard power* ketimbang sebelumnya, yakni *soft power* (Berg, Saudi Arabia's strategic stalemate – what next?, 2017). Dalam membentuk kebijakan luar negeri negaranya, Arab Saudi juga selalu mengimplementasikan kebijakan luar negeri yang dipengaruhi oleh aspek-aspek yang menjadi prioritasnya (Affairs, 2016). Oleh sebab itu kita bisa melihat bahwa kebijakan luar suatu negara tidak hanya dipengaruhi oleh keadaan domestik negara tersebut, melainkan terdapat faktor-faktor eksternal yang memungkinkan suatu negara mengeluarkan kebijakan tersebut.

#### **A. Hubungan Politik Internasional, Kebijakan Luar Negeri Dan Hubungan Internasional**

Terdapat banyak pengertian dari apa yang sering kita sebut politik internasional, kebijakan luar negeri dan hubungan internasional. Faktanya, berkaitan dengan studi politik internasional, sebagian besar telah mencakup dengan studi kebijakan luar negeri. Dikatakan demikian, karena politik internasional memporoskan kajiannya terhadap kepentingan, tindakan serta unsur kekuatan suatu negara yang memiliki

superioritas, dan itu merupakan bagian dari kebijakan luar negeri (Holsti, Politik Internasional Kerangka Untuk Analisis, 1988).

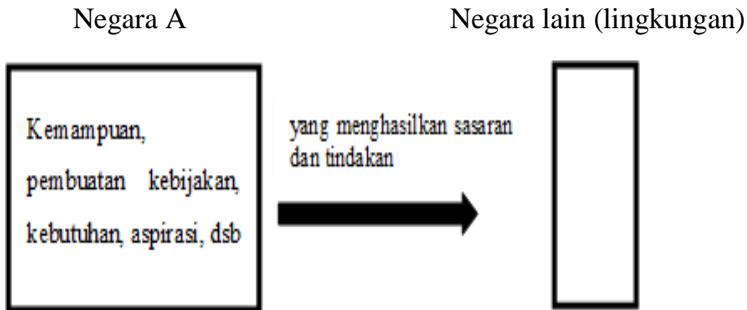
Selain itu politik internasional dan kebijakan luar negeri, keduanya adalah perbedaan yang mendeskripsikan sebuah tujuan dan tindakan (keputusan dan kebijakan) suatu negara sehingga membentuk interaksi terhadap negara lainnya, bisa dua negara atau lebih. Biasanya kebijakan luar negeri selalu berkaitan dengan tindakan suatu negara terhadap lingkungan dan kondisi eksternal. Sedangkan tindakan suatu negara sebagai bentuk respon terhadap tindakan negara lain, selalu berkaitan dengan politik internasional (Holsti, Politik Internasional Kerangka Untuk Analisis, 1988).

Berkaitan dengan studi hubungan internasional merupakan segala bentuk interaksi baik antar pemerintah negara satu dengan negara lainnya atau masyarakat satu ke masyarakat lainnya. Studi hubungan internasional sendiri telah termasuk dalam kebijakan luar negeri atau proses politik antar negara-negara, namun apabila kita berbicara tentang hubungan internasional kaitannya sangat luas, diantaranya termasuk studi serikat perdagangan internasional, Palang Merah Internasional, pariwisata, perdagangan internasional, transportasi, komunikasi, dan perkembangan nilai etnik internasional. Akan tetapi di antara tersebut dapat dikatakan bagian dari politik internasional ketika hal tersebut berkaitan dengan tujuan-tujuan pemerintah atau hal-hal tersebut diimplementasikan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan militer dan juga politik (Holsti, Politik Internasional Kerangka Untuk Analisis, 1988).

Terdapat bagan yang mengilustrasikan perbedaan kebijakan luar negeri dan politik internasional, yakni:

**Gambar 2.2**

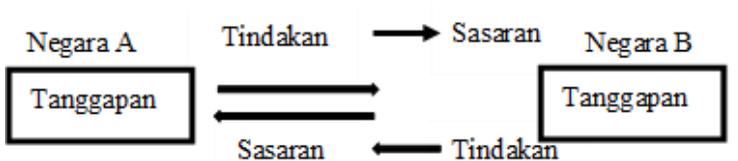
**Kebijakan Luar Negeri**



Sumber: K.J. Holsti, Politik Internasional Kerangka Untuk Analisis, 1988, hal 22

**Gambar 2.3**

**Politik Internasional**



sumber: K.J. Holsti, Politik Internasional Kerangka Untuk Analisis, 1988, hal 22

**B. Pengertian Politik Luar Negeri**

Politik luar negeri adalah sebuah cara atau rencana tindakan suatu negara yang dibuat oleh aktor-aktor yang

memiliki peranan dalam membuat keputusan suatu negara untuk menghadapi negara lain atau aspek politik internasional lainnya, yang bertujuan untuk mencapai apa yang menjadi kepentingan nasional negara tersebut. Politik luar negeri yang diimplementasikan oleh suatu negara merupakan hasil dari sebuah ide atau respon negara tersebut terhadap tindakan yang dilakukan oleh negara lain. Dalam politik luar negeri suatu negara meskipun keadaan internasional bersifat tidak tetap, negara harus tetap pada apa yang menjadi fokusnya atau tetap pada kebijakannya guna mencapai tujuan nasional negara tersebut. Metode teratas dalam menyusun ketepatan politik luar negeri, diantaranya:

- 1) Menggolongkan konsiderasi kepentingan nasional ke dalam tujuan yang jelas.
- 2) Memahami dengan baik keadaan domestik maupun lingkup internasional untuk menetapkan kebijakan luar negeri negara tersebut.
- 3) Negara tersebut harus mengetahui kemampuan nasionalnya guna mencapai kebijakan luar negerinya.
- 4) Negara tersebut harus memaksimalkan kemampuan nasionalnya untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya.
- 5) Negara tersebut cukup melakukan apa yang menjadi prioritas negaranya.
- 6) Negara tersebut harus melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dalam hitungan waktu tiap periode yang ditetapkan untuk mengetahui keadaan yang sedang terjadi guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Akan tetapi metode-metode yang telah di jabarkan diatas acap kali terjadi tidak berurutan dan tidak masuk di akal. Dalam beberapa fenomena, metode tersebut juga terkadang terjadi pada waktu yang bersamaan, sehingga isu-isu mendasar dapat terulang kembali ketika situasi berubah atau situasi kembali ke keadaan semula. Oleh karena keadaan internasional yang

kerap terjadi secara langsung selalu fluktuatif, maka dalam proses pembuatan ketetapan luar negeri selalu terjadi secara simultan (Plano & Olton, Kamus Hubungan Internasional, 1999).

Signifikansi politik luar negeri, pada dasarnya politik luar negeri tidak dapat dipisahkan dari ketetapan luar negeri, dimana politik luar negeri memiliki peranan utama dalam alur pembuatan keputusan nasional di setiap negara mana pun. Secara umum setiap negara akan mengerahkan kemampuannya untuk memaksimalkan terealisasinya politik luar negeri negara tersebut. Meskipun kadang politik luar negeri digambarkan sebagai dari aktivitas program-program luar negeri suatu negara, namun sebenarnya politik luar negeri suatu negara hanya menggambarkan keadaan tunggal, yang artinya adalah suatu keadaan yang menjadi fokus negara tersebut untuk mencapai tujuan nasionalnya. Maka sebab itu, negara dituntut untuk menggerakkan ketetapan, menganalisis apa yang menjadi fokusnya, menyusun rancangan strategi, melakukan penilaian terhadap ragam kemampuan yang dimiliki, meninjau dan menilai kebijakan-kebijakan dengan jelas. Sehingga apa yang sudah direncanakan akan berjalan sesuai dengan tujuan nasional negara tersebut. Biasanya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan politik luar negeri dilakukan oleh kementerian luar negeri. Selain itu politik luar negeri sulit untuk dilakukan penilaian, lantaran dalam menetapkan keputusan harus benar-benar memperhitungkan keuntungan dan kerugian dalam kurun waktu yang pendek untuk pencapaian jangka panjang, sikap politik negara lain yang nantinya akan berdampak terhadap negara kita sulit untuk di nilai, serta keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan diperoleh dari ketetapan yang akan sulit untuk dijelaskan (Plano & Olton, Kamus Hubungan Internasional, 1999).

### **C. Sifat-Sifat Politik Luar negeri**

Terdapat tiga jenis keputusan luar negeri pada konteks politik luar negeri suatu negara menurut Wiliam D. Coplin dalam buku Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis, diantaranya:

#### **1. Keputusan-keputusan Politik Luar Negeri yang Bersifat Umum**

Maksud dari kebijakan luar negeri yang bersifat umum adalah sejumlah keputusan-keputusan yang digambarkan melalui pernyataan-pernyataan kebijakan dan tindakan-tindakan nyata (Coplin, Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis, 1992).

#### **2. Keputusan Luar Negeri yang Bersifat Administratif**

Dalam keputusan administratif, keputusan dibuat oleh para anggota-anggota pemerintah yang memiliki tanggung jawab pada posisinya dalam melakukan hubungan luar negeri dengan negara lain. Selain itu keputusan administratif, dalam menjalin hubungan dengan negara lain tidak terjadi secara permanen, karena keputusan ini memiliki batasan ruang, lingkup, dan waktu tertentu (Coplin, Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis, 1992).

#### **3. Keputusan Luar Negeri Bersifat Krisis**

Keputusan luar negeri yang bersifat krisis merupakan sebuah keputusan yang memiliki pengaruh luas terhadap kebijakan umum suatu negara. Dalam keputusan luar negeri suatu negara, apabila negara tersebut mengeluarkan keputusan yang bersifat krisis, hal tersebut dapat menggambarkan adanya pergesaran politik luar negeri negara tersebut. Selain itu keputusan luar negeri tipe ini terdapat dalam bagian politik luar negeri suatu negara. Dapat dikatakan demikian karena dapat diaplikasikan sebagai proses pertimbangan oleh negara

(Coplin, Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis, 1992).

#### **D. Politik Luar Negeri dan Kebijakan Luar Negeri Arab Saudi**

Kerajaan Arab Saudi merupakan negara terluas yang berada di kawasan Timur Tengah. Negara ini memiliki wilayah administrasi yang berjumlah tiga belas. Masing-masing wilayah tersebut dipimpin oleh gubernur dan dewan daerah yang bertujuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada masyarakatnya. Politik luar negeri Arab Saudi didasarkan atas faktor geografis, sejarah, agama, ekonomi, politik yang dilandaskan atas prinsip-prinsip yang bersifat abadi dan faktual (Kingdom of Saudi Arabia Ministry of Foreign Affairs, 2016).

Selain itu, Arab Saudi merupakan negara yang menerapkan hukum syariat dinegaranya, oleh sebab itu membuat negara ini mengharuskan politik luar negerinya berkaitan dengan prinsip-prinsip Islam. Bagi Kerajaan Arab Saudi politik luar negeri negaranya merupakan hal yang pokok, karena dalam praktiknya politik luar negeri akan menghasilkan kebijakan luar negeri yang dapat membentuk sistem pemerintahan negaranya, sehingga hal tersebut dapat membawa pengaruh bagi negaranya (Affairs, 2016).

kebijakan luar negeri Arab Saudi yang terdepan adalah kebijakan *neighbour friendly*, kebijakan non intervensi terhadap urusan internal negara lain, mempererat hubungan baik dengan negara-negara Teluk dan negara-negara Semenanjung Arab, serta mempererat hubungan dengan negara di kawasan Arab dan negara-negara Islam demi kepentingan negara Arab Saudi, kemudian mengadvokasi permasalahan yang ada di negara-negara semenanjung Arab, mengadopsi kebijakan non blok, menjalin kerja sama dengan negara-negara sahabat, memainkan peran efektif dalam organisasi-organisasi internasional dan regional. Kebijakan tersebut muncul diakibatkan dari beberapa aspek, seperti

negara-negara Teluk, negara-negara Arab, negara-negara Islam, dan kalangan internasional sebagai berikut:

#### 1. Lingkaran negara Teluk

Sejak berdirinya kerajaan Arab Saudi yang digagas oleh para pendiri terdahulu dan King Abdulaziz bin Abdulrahman Al-Saud, lingkaran negara-negara Teluk dijadikan kebijakan luar negeri yang utama bagi Kerajaan Arab Saudi. Selain itu, lingkaran negara-negara Teluk juga dijadikan hal yang prioritas bagi kepentingan kerajaan Arab Saudi, sehingga menjalin hubungan dengan negara-negara Teluk adalah sebuah keharusan. Kerajaan Arab Saudi juga meyakini bahwa dalam lingkaran negara teluk, negara-negara yang termasuk di dalamnya memiliki beberapa kesamaan yang mana bagi mereka kesamaan tersebut dapat menyatukan keinginan dan mengkoordinasikan berbagai gabungan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan, ekonomi, sosial, pendidikan serta budaya di wilayah mereka, oleh sebab itu Sejak tahun 1981 pemimpin-pemimpin negara Teluk menyetujui adanya Dewan kerja sama untuk negara-negara Arab Teluk atau GCC (*Gulf Cooperation Council*) yang pertama kali melakukan pertemuan di Abu Dhabi (Affairs, 2016).

Selain itu kebijakan kerajaan Arab Saudi terhadap negara-negara Teluk dilakukan lantaran hal tersebut didasarkan atas sifat permanen dan utama, yang mana dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Keamanan dan stabilitas wilayah Teluk merupakan bagian dari tanggung jawab anggota negara-negara Teluk.
- b) Anggota negara teluk berhak melindungi wilayah mereka dari gangguan keamanan dan berhak

mempertahankan kemerdekaannya sesuai apa yang menjadi kebijakan mereka masing-masing yang telah dijamin oleh hukum internasional untuk menghadapi tantangan dari dalam negara mereka maupun lingkungan internasional.

- c) Kerajaan Arab Saudi menolak adanya campur tangan terhadap urusan internal negara-negara teluk dan bekerja sama dalam hal apapun termasuk bentuk serangan atau ancaman yang membahayakan terhadap salah satu anggota negara Teluk, karena serangan tersebut dianggap sebagai ancaman terhadap anggota negara Teluk yang lainnya juga.
- d) Kerajaan Arab Saudi dapat memperkuat kerja sama negaranya terhadap anggota negara Teluk di bidang politik, ekonomi, keamanan, sosial dan budaya secara mendalam.
- e) Mengarahkan kebijakan anggota negara-negara Teluk jika memungkinkan, khususnya kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu penting kawasan Teluk dan internasional.
- f) Mengambil tindakan serius dan dilakukan secara berkelanjutan guna menyelesaikan segala bentuk permasalahan, khususnya bagi masalah perbatasan. Tindakan tersebut sebagai bentuk atas prinsip persaudaraan dan *neighbour friendly*.
- g) Semangat negara-negara teluk yang didukung oleh arahan ekonomi dalam menyatukan kebijakan ekonomi dan menetapkan satu lingkup yang sesuai, serta memberikan fokus terhadap arahan yang berkaitan dengan kebijakan minyak negara-negara Teluk yang sesuai dengan kepentingan negaranya. Karena minyak merupakan sumber strategis masing-masing negara Teluk (Affairs, 2016).

## 2. Lingkaran Arab

Sejak berdirinya Liga Arab pada Maret 1945, Kerajaan Arab Saudi menyadari bahwa pentingnya menyatukan sikap negara-negara Arab. Selain itu, Liga Arab didirikan untuk mendirikan sebuah mekanisme dengan mengkoordinasikan hubungan negara-negara Arab dan melayani kepentingan negara-negara Arab, serta isu-isu yang ada di negara-negara Arab (Affairs, 2016).

Dalam lingkup negara-negara Arab, kerajaan Arab Saudi juga melakukan kebijakan yang didasarkan atas prinsip-prinsip tetap dan utama, yakni sebagai berikut:

- a) Hubungan yang terbangun atas Arab-nasionalisme dan Islam, dimana wilayah negara-negara Arab merupakan tempat lahirnya Islam dan Arab-nasionalisme. Ini selalu ditekankan oleh kerajaan Arab Saudi sejak raja AbdulAziz.
- b) Kebutuhan akan solidaritas negara-negara Arab, kemudian perlunya arahan negara-negara Arab yang bertujuan untuk menyatukan negara-negara Arab dan memanfaatkan kemampuan dan sumber yang mereka miliki guna memenuhi kebutuhan negara-negara Arab.
- c) Pandangan realisme, untuk menghindari pandangan dan perilaku yang berlebihan. Karena hal tersebut akan memberikan dampak terhadap keamanan dan stabilitas kawasan Arab. Serta mencegah campur tangan terhadap urusan internal negara-negara Arab.
- d) Memegang teguh prinsip persaudaraan Arab dengan memberikan bantuan dan dukungan terhadap negara-negara Arab (Affairs, 2016).

Dari beberapa prinsip di atas, hal tersebut dilakukan oleh kerajaan Arab Saudi lantaran Kerajaan Arab Saudi menjaga nama baik negaranya. Selain itu posisi dan tingkat kepercayaan negara-negara Arab terhadap kerajaan Arab Saudi yang harus dijaganya (Affairs, 2016).

### 3. Lingkaran Islam

Islam adalah hal yang sangat fundamental dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri Kerajaan Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi lebih memprioritaskan akan hal-hal yang berlatar belakang Islam, tujuan kerajaan Arab Saudi tidak lain adalah untuk mencapai solidaritas Islam (Affairs, 2016).

Dalam lingkup negara-negara Islam, kerajaan Arab Saudi mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk sebagai berikut:

- a) Mencapai solidaritas yang luas
- b) Kerajaan Arab Saudi ingin membuka pandangan baru untuk melakukan kerja sama ekonomi dalam lingkup negara-negara Islam dengan tujuan saling dukung-mendukung terhadap kemampuan masing-masing negara yang berbeda
- c) Bersatu untuk melawan segala bentuk ancaman terhadap dunia Islam
- d) Saling bekerja sama dalam organisasi konferensi Islam dan saling mendukung guna mencapai hasil yang nantinya diperlukan ketika menghadapi isu-isu yang terjadi di dunia Islam
- e) Negara-negara Islam turut berperan aktif dalam menghadapi aturan dunia. selain itu negara-negara Islam juga turut mendukung dan memberikan bantuan terhadap kelompok minoritas muslim di seluruh dunia. serta negara-negara Islam juga harus menjaga apa yang menjadi hak kelompok minoritas tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional
- f) Menunjukkan aksi yang baik terhadap dunia mengenai pandangan terhadap umat Islam dari segala tuduhan yang menunjuk bahwa Islam adalah teroris dan melanggar hak asasi manusia (Affairs, 2016).

### 4. Lingkaran Internasional

Politik luar negeri Kerajaan Arab Saudi dalam lingkaran internasional cenderung mempertimbangkan baik buruknya yang akan didapat ketika negaranya mengeluarkan kebijakan tersebut. Kerajaan Arab Saudi akan lebih fleksibel dengan

keadaan sekitarnya. Pada tahun 1945, Arab Saudi menjadi inisiator Perserikatan Bangsa-Bangsa yang salah satu tujuan berdirinya adalah menciptakan perdamaian internasional, yang saat ini menjadi salah satu fokus politik luar negeri kerajaan Arab Saudi. Menurutnya perdamaian dapat membawa perkembangan, kemakmuran dan stabilitas. Maka, Arab Saudi tidak menggunakan kekuatan sebagai alat untuk politik luar negerinya (Affairs, 2016).

Kemudian dalam lingkup internasional, kerajaan Arab Saudi melakukan kebijakan luar negeri yang didasarkan atas sifat permanen dan utama, antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Kebebasan mengemukakan pendapat kepada masyarakat internasional dalam PBB mengenai kesepakatan internasional, dasar hukum internasional dan menentukan kerangka kerja umum negara-negara serta masyarakat yang beradab. Hal tersebut ingin di raih oleh Kerajaan Arab Saudi sesuai dengan komitmen yang terdapat dalam piagam PBB.
- b) Keinginan kerajaan Arab Saudi terhadap stabilitas pasar minyak internasional dan kemauan kerajaan Arab Saudi dalam mengembangkan perdagangan internasional dengan cara yang adil sesuai dengan dasar-dasar ekonomi pasar bebas.
- c) Dalam bentuk moral kerajaan Arab Saudi membantu korban bencana alam, pengungsi dan tuna wisma di berbagai belahan dunia (Affairs, 2016).

Selain itu dalam proses pembuatan kebijakan di dalam kerajaan Arab Saudi tidak terlepas dari campur tangan keluarga Kerajaan Arab Saudi dan dipengaruhi oleh faktor domestik yang mencerminkan kepentingan-kepentingan pangeran di Kerajaan Arab Saudi, karena keluarga kerajaan Arab Saudi menduduki posisi vital di dalam pemerintahan. Tidak hanya itu, Ulama juga memainkan peran penting dalam pembuatan kebijakan luar negeri kerajaan Arab Saudi (Berg, Saudi Arabia's strategic stalemate – what next?, 2017).

Dalam kebijakan luar negeri kerajaan Arab Saudi pada awalnya negara ini mengeluarkan kebijakan yang bersifat *soft power* dan justru kerajaan Arab Saudi meminta bantuan terhadap negara lain karena merasa tidak mampu dalam menangani permasalahan yang sedang terjadi, namun belakangan ini Kerajaan Arab Saudi justru mengeluarkan kebijakan yang bersifat *Hard power* dan menjadi pihak yang superioritas di kawasan Timur Tengah. Kebijakan-kebijakan kerajaan Arab Saudi yang belakangan ini terjadi, yakni melakukan perang terhadap kelompok Houthi di yaman, membuat aliansi militer guna memerangi terorisme, melakukan dukungan terhadap beberapa kelompok perang sipil yang terjadi di Suriah dan memblokade negara Qatar (Berg, Saudi Arabia's strategic stalemate – what next?, 2017).